



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALOPO
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. JUDAS AMIR
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 170471

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.615.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 461 m²/400 m² di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/1811 m² di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 3.675.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m²/900 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 5.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 341.594.869**F. HARTA LAINNYA** Rp. 351.990.240

Sub Total Rp. 11.558.585.109

III. HUTANG Rp. 1.260.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 10.298.585.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALOPO

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. RAHMAT MASRI BANDASO,
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 71869

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 654 m2/297 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 420.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW INOVA 2.0 Q M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.003.699

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.504.003.699

III. HUTANG Rp. 131.437.105

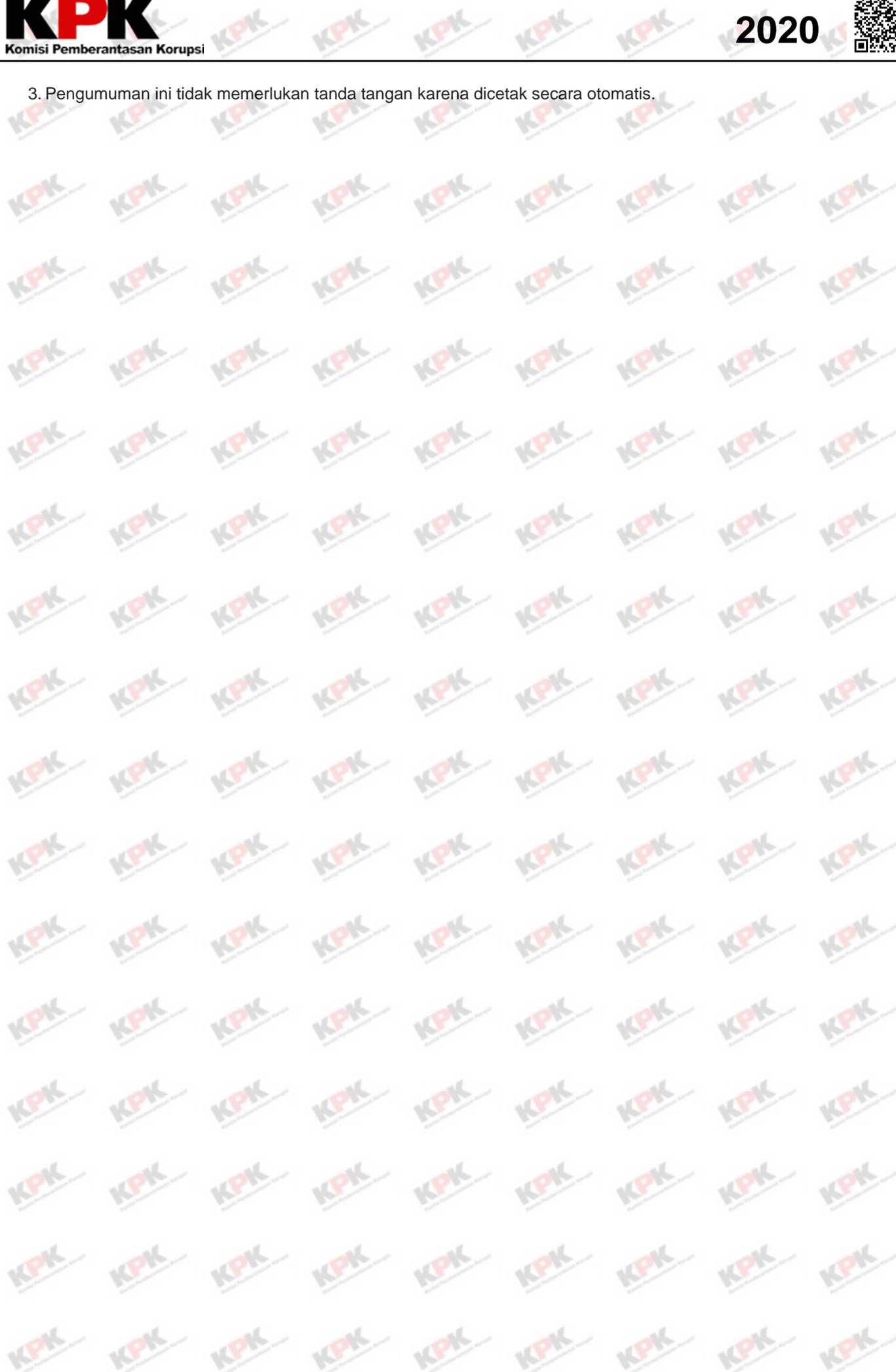
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.372.566.594

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALOPO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRMANZA DP.
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 194945

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.350.000.000

1. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/67.5 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/117 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.161.251

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.386.661.251

III. HUTANG Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.986.661.251

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.